

RENJA 2023



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG



LAPORAN RENCANA KERJA
TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG

Jl. Desa Parahu-Sukamulya, Kabupaten Tangerang
Telp/Fax. 021 - 29508253

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Tangerang. Dan kami bersyukur pula karena kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sebagai acuan atau panduan kerja selama 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2023 ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor perhubungan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan permasalahan – permasalahan kunci di daerah, isu – isu kerja pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Besar harapan kami bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang melalui program – program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten yang terdepan di Propinsi Banten. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukamulya,

2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANGERANG,**



Drs. H. AGUS SURYANA, M.Si

NIP. 19660409 198603 1 005
Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
	Halaman	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	4
	C. Maksud dan Tujuan	5
	D. Sistematika Penulisan	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU & PENCAPAIAN RESTRA	
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu	7
	B. Analisa Tingkat Hasil Pelayanan	12
	C. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	15
	D. Review Rencana Strategis (RENSTRA)	37
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIAT	
	A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	60
	B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	60
	C. Program dan Kegiatan	62
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDAPATAN PERANGKAT DAERAH	63
BAB V	IV PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing – masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Renja SKPD.

Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif dan merupakan tanggung jawab masing – masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan akhir RKPD, untuk itu masing – masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA – SKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Penyusunan Renja SKPD sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 memiliki beberapa tahapan, antara lain :

1. Persiapan penyusunan RENJA SKPD;
2. Penyusunan RENJA SKPD;
3. Pelaksanaan Forum SKPD; dan
4. Penetapan Renja SKPD

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

1. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja SKPD;
2. orientasi mengenai Renja SKPD;
3. penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja SKPD; dan
4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Renja SKPD disusun :

1. mengacu pada rancangan akhir RKPD;
2. mengacu pada Renstra SKPD;
3. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
4. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan b
5. erdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

Perumusan Renja SKPD sebagaimana dimaksud mencakup :

- a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. penelaahan rancangan akhir RKPD;

- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

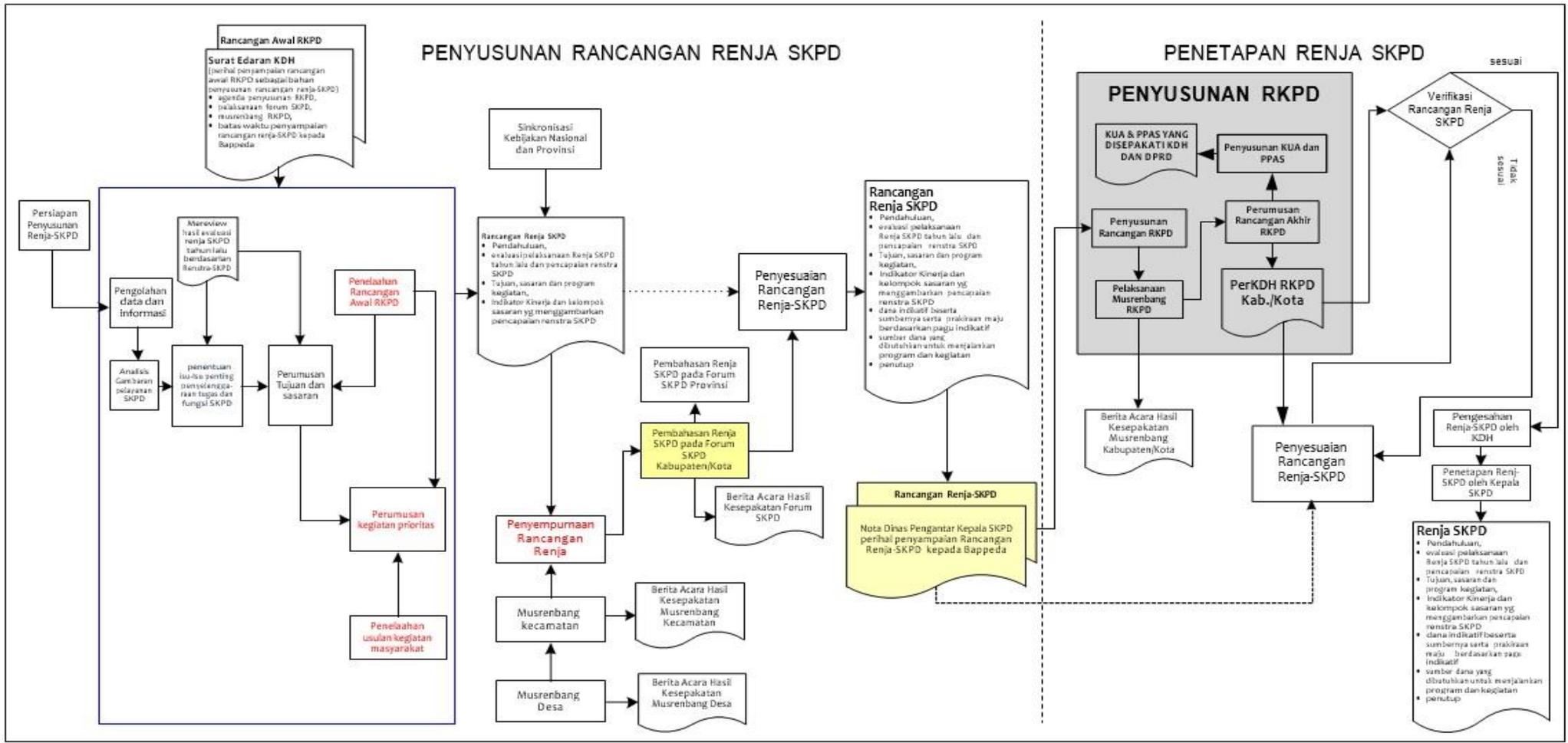
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak akhir tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018; dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dapat kita lihat bagan alir tahapan penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



Sejalan dengan Misi ke 5 Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 yakni **Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah**, maka ditetapkanlah tujuan Dinas Perhubungan yaitu “ **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan** ” yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2023 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

Renja SKPD berkaitan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk mencapai target pertahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan mendukung Misi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:

- Misi I : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius
- Misi II : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
- Misi III : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif, berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM).
- Misi IV : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
- Misi V : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
- Misi VI : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Dalam penyusunan Renja SKPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mendukung Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

B. Landasan Hukum

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. PP No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. PERPRES RI No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. PERDA PROV. BANTEN No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
8. PERDA PROV. BANTEN No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
9. PERDA KAB. TANGERANG No. 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
10. PERDA KAB. TANGERANG No. 11 Tahun 2015 tentang Perubahan PERDA KAB. TANGERANG No. 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
12. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
13. PERDA KAB. TANGERANG No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
14. PERBUP TANGERANG No. 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2023 adalah untuk menyelaraskan dengan penjabaran Penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor 050/Kep 71-DISHUB tanggal 01 April 2022 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2023, yaitu :

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renja SKPD dengan Renstra SKPD atau dengan dokumen lainnya yang terkait;
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setiap tahunnya;
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG

Bab ini menggambarkan tentang tujuan dan sasaran pembangunan SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Program dan indikasi kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU & PENCAPAIAN
RENSTRA SKPD

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tangerang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah :

Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 setelah APBD Tahun 2022 sebanyak 2 Program, 16 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan, yang terdiri dari program SKPD sebanyak 1 Program, 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, serta program Wajib Pilihan sebanyak 1 Program, 9 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan Adapun Anggaran dan realisasi program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Renstra Tahun 2019- 2023) s/d Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang
Tahun Anggran 2022
Januari s/d Juni 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	DINAS PERHUBUNGAN	62.811.332.530,00	29.821.662.413,00	47,48	50,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.720.205.539,00	13.205.569.464,00	53,42	50,00
2.15.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN	264.538.000,00	135.417.600,00	51,19	55,00

	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.925.000,00	29.130.000,00	34,71	35,00
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.855.000,00	3.000.000,00	30,44	35,00
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.758.000,00	103.287.600,00	60,49	75,00
2.15.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.512.441.705,00	5.387.097.648,00	51,24	60,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.502.211.705,00	5.387.097.648,00	51,29	60,00
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.230.000,00		0,00	
2.15.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	61.040.000,00	7.000.000,00	11,47	25,00
2.15.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	61.040.000,00	7.000.000,00	11,47	25,00
2.15.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.500.000,00	0,00	0,00	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.500.000,00		0,00	
2.15.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.684.945.830,00	432.172.250,00	25,65	45,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.337.180,00	26.706.750,00	73,50	75,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	762.517.360,00	116.277.000,00	15,25	25,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.556.940,00	8.000.000,00	6,53	25,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.470.350,00	144.594.500,00	80,57	95,00
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.926.000,00	31.524.000,00	43,83	50,00
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.788.000,00	24.920.000,00	22,09	25,00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.350.000,00	80.150.000,00	20,07	25,00
2.15.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.122.074.950,00	6.323.163.516,00	62,47	65,00
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	3.000.000,00	25,00	25,00

2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	490.274.950,00	263.033.516,00	53,65	55,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.619.800.000,00	6.057.130.000,00	62,97	65,00
2.15.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.029.665.054,00	920.718.450,00	45,36	50,00
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	515.901.000,00	108.681.550,00	21,07	25,00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	608.055.000,00	327.300.000,00	53,83	55,00
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.150.000,00	29.178.000,00	14,09	25,00
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	598.492.000,00	455.558.900,00	76,12	100,00
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.067.054,00		0,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	38.091.126.991,00	16.616.092.949,00	43,62	50,00
2.15.02.2.01	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	189.515.300,00	33.710.000,00	17,79	25,00
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	189.515.300,00	33.710.000,00	17,79	25,00
2.15.02.2.02	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	26.481.088.511,00	15.199.190.449,00	57,40	65,00
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.579.340.050,00	58.182.000,00	3,68	25,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.969.441.770,00	203.760.500,00	6,86	25,00
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	21.812.306.691,00	14.818.297.149,00	67,94	75,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	120.000.000,00	118.950.800,00	99,13	100,00
2.15.02.2.04	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	609.942.000,00	0,00	0,00	

2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	609.942.000,00		0,00	
2.15.02.2.05	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	3.244.879.910,00	0,00	0,00	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.244.879.910,00		0,00	
2.15.02.2.06	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	6.444.300.470,00	1.131.855.200,00	17,56	25,00
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4.903.403.070,00	261.834.000,00	5,34	25,00
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.540.897.400,00	870.021.200,00	56,46	60,00
2.15.02.2.07	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	47.736.000,00	11.934.000,00	25,00	25,00
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	47.736.000,00	11.934.000,00	25,00	25,00
2.15.02.2.08	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	760.826.300,00	152.261.300,00	20,01	25,00
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	760.826.300,00	152.261.300,00	20,01	25,00
2.15.02.2.09	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.587.200,00	30.000.000,00	25,51	30,00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	117.587.200,00	30.000.000,00	25,51	30,00
2.15.02.2.14	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	195.251.300,00	57.142.000,00	29,27	35,00

	DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	195.251.300,00	57.142.000,00	29,27	35,00

Capaian prosentase realisasi Belanja Langsung Triwulan II pada tahun 2022 sebesar 47,48%,

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 dapat disimpulkan bahwa realisasi keuangan mencapai sebesar 47,48 % dengan realisasi fisik sebesar 50 %

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

I.PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang telah dilaksanakan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dalam penyerapan masih ada beberapa kegiatan yang realisasinya rendah meskipun demikian adanya beberapa kendala teknis pelaksanaan kegiatan serta adanya ke tidak sesuaian target indikator sesuai Renstra yang ada dengan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikatakan baik, akan tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan.

Permasalahan yang timbul bukan karena pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai, melainkan adanya perubahan harga satuan pada proses pengadaan Barang dan jasa sementara proses pengadaan tersebut sedang berlangsung hal ini mengakibatkan proses pembayaran/pencairannya terlambat, maka perlu adanya koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

Pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun Anggaran 2022 dengan usulan sebesar Rp. 62.811.332.530,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.821.662.413,- adapun anggaran dan realisasi Program kegiatan tersebut masih terhitung bulan Juni Tahun 2022 dengan 2 program dan 16 kegiatan 35 Sub Kegiatan, mencapai 47,48 %.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Tangerang, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang adalah sebagai peningkatan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi kabupaten. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransportasi dan sebagai pengguna jalan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan urusan perhubungan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

B. Analisa Tingkat Hasil Pelayanan

Transportasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan, dimana permasalahan utama adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif terhadap besarnya biaya transportasi, pemborosan waktu dan energi, serta dampak sosial dan lingkungan. Dalam jangka panjang permasalahan transportasi ini akan berakibat pada turunnya daya saing ekonomi kota serta *livability* kota bagi kehidupan penduduknya. Begitu pula di Kabupaten Tangerang, permasalahan transportasi menjadi salah satu permasalahan klasik yang cukup sulit untuk diselesaikan.

Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis yang cukup strategis dengan ibukotanya adalah Tigaraksa. Letak astronomis antara 6°00'- 6°20' Lintang Selatan dan 106°20'-106°43' Bujur

Timur. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,51 km² atau 9,93 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Banten dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak. Hasil Proyeksi Penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 3,24 juta orang, terdiri dari 1,66 juta laki-laki dan 1,54 juta perempuan. Persentase penduduk Tangerang pada tahun 2020 mencapai 27,26 persen dari total penduduk Banten yang berjumlah lebih dari 11,90 juta orang. Disamping itu, di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat pembangunan kawasan perumahan dan industri di kawasan pinggiran atau luar kota yang akan memanfaatkan jaringan utama (ruas jalan tol atau arteri). Kecepatan pembangunan pemukiman dan industri hampir selalu tidak sebanding dengan kecepatan pembangunan jalan sehingga dalam waktu yang sangat singkat kapasitas jalan sudah mendekati jenuh atau bahkan sudah terlampaui. Jarak yang semakin jauh dari tempat tinggal menuju tempat kerja, mendorong penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat.

Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi secara langsung berpengaruh terhadap kinerja persimpangan yang ada pada jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Tangerang. Peningkatan derajat jenuh dan tundaan simpang yang terjadi akan memperpanjang waktu perjalanan para pengguna jalan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pengukuran kinerja persimpangan di jalan kabupaten yang selanjutnya diusulkan upaya mengatasi penurunan kinerja persimpangan tersebut terdiri dari 22 persimpangan yang meliputi

- Simpang tidak bersinyal :
 1. Simpang 4 Pinang
 2. Simpang 4 Polsek Tigaraksa
 3. Simpang 4 Pasar Kemis
 4. Simpang 4 Sepatan
 5. Simpang 4 Ceplak
 6. Simpang 4 Merak
 7. Simpang 4 Talang
 8. Simpang 4 Oja
 9. Simpang 4 Cijengir
 10. Simpang 4 Dadap Kosambi
 11. Simpang 3 Islamic
 12. Simpang 3 Kelapa Dua
 13. Simpang 3 Medang
 14. Simpang 3 Katomas
 15. Simpang 3 Entry Tol Cikupa
 16. Simpang 3 PLN Pasar Kemis

- 17. Simpang 3 Sulang
- 18. Simpang 3 Sentiong
- 19. Simpang 3 Gelam
- 20. Simpang 3 Teluk Naga

- Simpang bersinyal (APILL) yang meliputi:

- 21. Simpang 4 Exit Tol Cikupa
- 22. Simpang 4 Rajeg

Strategi peningkatan kinerja simpang dilakukan pada tahun eksisting tanpa melakukan proyeksi peningkatan volume lalu lintas pada tahun rencana. Indikator yang digunakan dalam pengukuran tingkat pelayanan simpang adalah tundaan simpang

Vc rasio adalah untuk mengetahui kinerja persimpangan pada kondisi eksisting kemudian melakukan upaya perbaikan kinerja persimpangan.

Tujuan Vc rasio ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung derajat jenuh persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.
2. Menghitung tundaan persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.
3. Melakukan upaya mengatasi penurunan kinerja persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.

Berdasarkan data jaringan jalan dari Bina Marga Kabupaten Tangerang, panjang jalan yang ada di Kabupaten Tangerang adalah 1.133,04 Km. Dimana dalam pembagiannya berdasarkan status jalan

Panjang Jalan Di Kabupaten Tangerang

Status Jalan	Panjang Jalan (km)
Jalan Nasional	27,93
Jalan Provinsi	114,49
Jalan Kabupaten	990,62

C. PERMASLAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

I. IDENTIFIKASI PERMSALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Secara administratif, Kabupaten Tangerang merupakan salahsatu daerah tingkat II yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Secara astronomis, Kabupaten Tangerang terletak pada koordinat 106°20' hingga 106°44' Bujur Timur dan 5°58' hingga 6°21' Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang antara lain:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan panjang garis pantai ±51 Km)
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak

Kabupaten Tangerang secara geografis berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, trickling down dan backwash effect, terjadi bentuk hubungan yang sinergis antara kedua region tersebut. Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) adalah sekitar 30 km. Keduanya dihubungkan dengan jalur transportasi darat (jalan) bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera..

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan –kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi, Masalah tersebut disebabkan oleh belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal untuk penyediaan perlengkapan jalan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas, dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase.

2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas
3. Belum adanya penerapan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas satu arah
4. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan.

Masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya load factor angkutan umum, keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan antar moda relatif rendah, belum optimalnya ketersediaan dan fungsi prasarana pengujian dan terminal.

Selain itu telah diidentifikasi permasalahan pada lingkungan eksternal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
1.	Dekade aksi keselamatan lalu lintas jalan darat Internasional periode 2011-2020	Terbitnya Perpres No. 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek	Melakukan sinkronisasi dengan rencana jaringan transportasi di Jabodetabek (Jutpi)
2.	Globalisasi Perekonomian	Pembangunan konektivitas nasional	Rencana Pembangunan BRT, LRT dan MRT Serta Terminal Type A, C yang terintegrasi
3.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis	Munculnya angkutan tidak dalam trayek (online)	Rentan konflik angkutan umum konvensional dengan angkutan online

Dinamika Internasional

Indonesia mengambil sikap mendukung “Decade of Action for Road Safety” yang dicetuskan oleh PBB. Hal ini akan dinyatakan melalui kegiatan “Pencanangan Aksi keselamatan Jalan Indonesia” dengan pengesahan “Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan” oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011. Tanggal 11 Mei 2011 merupakan tanda diawalinya “ Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2011-2020 yang menargetkan penurunan tingkat kecelakaan. Dalam Resolusi PBB no. 64/255 butir 7 diamanatkan kepada setiap negara anggota PBB untuk menetapkan targetnya masing-masing.

Tujuan Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2011-2020 :

- a. Melaksanakan platform global, regional dan nasional untuk mengurangi angka korban kecelakaan di jalan melalui program “Dekade Aksi Keselamatan Jalan RI (2011-2020) ;
- b. Mengesahkan dan meluncurkan dokumen “Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Jalan RI ;
- c. Mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam aksi penurunan jumlah korban kecelakaan d. Single Message : SAATNYA BERTINDAK ! (Time For Action)

- **Rekan Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2011-2020**

- **Pemerintah**

Pemerintah berperan untuk memberikan panduan-panduan agar tercapainya keselamatan di Jalan. Panduan-panduan tersebut disediakan oleh Pemerintah.

Dinamika Nasional

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek adalah sebagai dokumen acuan pembangunan transportasi bagi Pemerintah Daerah se Jabodetabek dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan pengendalian jasa pelayanan transportasi sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Visi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek adalah mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif.

Misi penyelenggaraan dan pengelotraan transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

1. Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda.
2. Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan antar wilayah Jabodetabek dalam sahr kesahran wilayah perkotaan.
3. Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perkotaan,
4. Mengintegrasikan riencana pembiayaan transportasi perkotaan.

Cakupan rencana induk ini meliputi 9 (sembilan) pilar kebijakan peobangunan transportasi di Jabodetabek yang meliputi:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan;
2. Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan;
3. Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasisjalan;
4. Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel;
5. Pengembangan transportasi terintegrasi;
6. Peningkatan kinerja lalu lintas;

7. Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan;
8. Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang; dan
9. Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.

Dinamika Regional

JUTPI adalah Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan dan ketentuan Undang-undang yang mempengaruhi Rencana Pengembangan Transportasi dalam rangka mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan memutakhirkan basis data transportasi perkotaan Jabodetabekserta melakukan revisi rekomendasi rencana induk transportasi hasil Study On Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP).

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2018-2023 adalah: “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJMD 2018-2023 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 5 yaitu: “***Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah***”

Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana tabel 2.3

Tabel 2.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera”.				
Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	Simpul Transportasi Antar Moda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan 2. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 	Adanya pembangunan Terminal Type A dan C, serta BRT, LRT, MRT
	Program Manajemen Lalu Lintas	Kurangnya Infrastruktur Jalan Yang Memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Adanya Penerapan Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas Satu Arah 	
	Program Pelayanan Angkutan Umum (sitram)	Tingginya Tingkat Jumlah Kendaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya Kebutuhan Transportasi Moda Darat 2. Tingkat Kesadaran Dari Masyarakat Berlalu Lintas Masih Rendah 	Masyarakat Masih Membutuhkan Angkutam Umum

2.4 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

2.4.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan RENSTRA Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 adalah terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan; terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air; terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai standar pelayanan minimal; terwujudnya profesionalisme SDM transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi; meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2015-2019) meliputi hal-hal sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;

Strategi :

- Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
- Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
- Penguatan kelembagaan.

2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

Strategi :

- Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
- Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.

B. Pelayanan

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

Strategi :

- Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;
- Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi.

2. Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;

Strategi :

- Menyusun Man Power Planning SDM transportasi;
- Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi;

- Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi;
 - Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi;
 - Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan;
 - Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
- Strategi :
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti;
 - Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian;
 - Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset & industri;
 - Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.
4. Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance;
- Strategi :
- Penuntasan agenda reformasi birokrasi;
 - Integrasi system manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan;
 - Penyederhaan perizinan dan penerapan e-government dilingkungan Kemenhub.
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- Strategi :
- Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi;
 - Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya;
 - Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- Strategi :
- Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim;
 - Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan/EBT;
 - Penerapan system manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum.
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance;
- Strategi :
- Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan quality assurance;
 - Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan.

C. Kapasitas Transportasi

1. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
Strategi :
 - Peningkatan kualitas sarana prasaranan angkutan umum massal perkotaan;
 - Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes;
 - Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;
 - Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;

2. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil.
Strategi :
 - Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah;
 - Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
 - Penyediaan sarana angkutan keperintisan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan rawan bencana.

3. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan;
 - Penggunaan teknologi intelligent transport system (ITS), pembangunan area traffic control system (ATCS) pada perlengkapan jalan (APILL, PJU, warning light)

Tabel 2.5

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah	Tingkat Kemacetan Lalu Lintas terus meningkat	1. Simpul Transportasi antar moda 2. Kurangnya infrastruktur yang memadai 3. Tingginya tingkat jumlah kendaraan	Komitmen Pemda; Kerjasama dengan Dishub Provinsi Banten

2.5.1 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Banten Tahun 2012-2017

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, memuat Visi pembangunan Provinsi Banten, yaitu: “ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH” . Untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
- 3) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
- 4) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Program/kegiatan prioritas Provinsi Banten yang berhubungan dengan Kabupaten Tangerang adalah :

- a) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di daerah meliputi : Serpong-Balaraja, Bojong Gede-Balaraja.
- b) Pengembangan jaringan Jakarta Outer Ring Road II yang meliputi Cengkareng – Batu ceper- Kunciran – serpong Serpong Cinere.
- c) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di daerah meliputi : Tangerang-Merak, Semanan-Rajeg-Balaraja, Kamal-Teluknaga-Rajeg.
- d) Rencana Pengembangan jalan Nasional Tangerang-Bandara Soekarno Hatta
- e) Pengembangan jaringan jalan provinsi meliputi : Banten Lama-Pontang, Pontang-Kronjo, Kronjo-Mauk, Mauk-Teluknaga, Teluknaga-Dadap, Citeras-Tigaraksa, Tigaraksa-Malanengah, Sp. Bitung-Curug, Curug-Legok-Parung Panjang, Cisauk-Jaha.
- f) Rencana Pengembangan Terminal Balaraja di Kabupaten Tangerang;
- g) Pengembangan jaringan Kereta Api, Serang-Cikande-Cikupa-Serpong.
- h) Pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada lintas Parung Panjang-Serpong-Citayam-Nambo-Cikarang; Lintas Serang-Sepadan tol-Balaraja, Lintas Balaraja-Jakarta-Cikarang.
- i) Rencana Pembangunan Dryport di Kecamatan Jambe
- j) Pengembangan Angkutan Massal cepat terpadu berbasis Rel Cilegon – Serpong – Pandeglang – Rangkas Bitung dan jalur MRT Lintas Batu Ceper Serpong.
- k) Pengembangan Angkutan Massal cepat terpadu berbasis Rel dari wilayah Timur Ke Wilayah Barat yaitu Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang;
- l) Rencana Pembangunan Transit Oriented Depelopment /TOD diseluruh Provinsi Banten;
- m) Pengembangan Stasiun Kereta api termasuk Park and Ride Pada PusatStarategis Nasional, Provinsi Kabupaten dan Kota meliputi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp): Balaraja dan Teluknaga; dan Pusat kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi perkotaan Kronjo dan Tigaraksa;

- n) Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyebarangan di Provinsi Banten meliputi Cituis-Kep. Seribu, Dadap-Kep. Seribu.
- o) Rencana pengembangan lokasi wilayah kerja pelabuhan pengumpan lokal di Cituis dan Kresek/Kronjo.
- p) Rencana pengembangan lokasi wilayah kerja pelabuhan penimbang lokal di Pakuhaji dan Sepatan.
- q) Koridor Utara (Koridor Ekonomi Banten) menghubungkan sentra-sentra pertumbuhan primer Tangerang-Balaraja-Cikupa-Serang-Cilegon-Merak.
- r) Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Udara di Bandar Udara Budiarto di Kabupaten Tangerang sebagai Bandar Udara diperuntukan khusus sebagai pusat pendidikan dan latihan penerbangan di Indonesia.

2.6 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHS

2.6.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merada pada tahapan keempat RPJPD yaitu tahap usaha peningkatan berkelanjutan. Berdasarkan pencapaian pembangunan selama tiga periode yang dilaksanakan secara konsisten, maka tahapan keempat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Strategi yang dilakukan pada tahapan ini adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan
5. Mengendalikan rencana tata ruang wilayah
6. Mengendalikan kualitas lingkungan hidup

2.6.2 Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”** dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

2.6.3 Kebijakan Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Tangerang meliputi sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi sistem jaringan sumber daya air; sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi meliputi :

- 1) Sistem jaringan transportasi darat;
- 2) Sistem jaringan transportasi laut; dan
- 3) Sistem jaringan transportasi udara.

a) Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- 1) Sistem jaringan jalan;
- 2) Sistem jaringan kereta api;
- 3) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

1) Sistem Jaringan Jalan

- a) Jaringan jalan nasional;
- b) Jaringan jalan provinsi;
- c) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d) Terminal penumpang;
- e) Terminal barang; dan
- f) jembatan jembatan timbang.

a) Jaringan jalan nasional, meliputi :

a. Jaringan jalan arteri primer, meliputi :

- (a) peningkatan ruas Jalan Raya Serang yang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti dengan panjang jalan kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilometer.

- (b) peningkatan ruas Jalan Pamulang–Maja yang melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Solear.
- b. Jaringan jalan tol meliputi :
 - (a) peningkatan jalan tol Tangerang–Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti;
 - (b) rencana ruas jalan tol Sepatan Timur–Pakuhaji–Teluknaga–Kosambi– Bandara Soekarno Hatta melalui Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol JORR II;
 - (c) rencana ruas jalan tol Balaraja–Serpong melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Jambe, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan;
 - (d) rencana ruas jalan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Balaraja.
 - (e) rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu keluar masuk kearah Cikupa di pintu tol Balaraja Timur berada di Kecamatan Balaraja;
 - (f) rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu keluar kearah Pasar Kemis di pintu tol Cikupa berada di Kecamatan Cikupa;
 - (g) rencana ruas jalan tol Semanan – Rajeg – Balaraja;
 - (h) rencana ruas jalan tol prospektif yang terhubung ke Jalan Tol Serpong-Balaraja; dan
 - (i) rencana simpang susun jalan tol.

2. Jaringan Jalan Provinsi

Jaringan Jalan Provinsi berupa jalan kolektor primer yang meliputi:

- (a) rencana peningkatan ruas jalan Kronjo–Mauk–Teluknaga–Bandara Soekarno-Hatta yang melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer.

- (b) rencana peningkatan ruas jalan Tigaraksa–Cisoka–Cikuya–Cikasungka yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak, melewati kecamatan Tigaraksa, Cisoka dan kecamatan Solear, dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer;
- (c) rencana peningkatan ruas jalan Malang Nengah – Ranca Kelapa – Kutruk – Tigaraksa yang menghubungkan Kecamatan Legok dengan pusat pemerintahan Kabupaten, melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa, dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) kilometer;
- (d) rencana peningkatan ruas jalan Cisauk–Jaha yang merupakan akses dari Cisauk menuju Legok, melewati Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok, dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) kilometer; dan
- (e) rencana peningkatan ruas jalan Bitung–Curug–Legok-Parung melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer;
- (f) Rencana pengembangan Angkutan massal berbasis jalan dapat berupa Bus Rapid Transit (BRT)

3. Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor (Kewenangan Kabupaten)

Rencana Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten berupa peningkatan jaringan jalan kolektor meliputi:

- a) Rencana peningkatan jaringan jalan kolektor meliputi:
 - (a) ruas jalan Bojong–Pemda yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
 - (b) ruas jalan Cikupa–Pasar Kemis melewati Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 20 (dua puluh) meter
 - (c) ruas jalan Jatiuwung–Pasar Kemis berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 20 (dua puluh) meter
 - (d) ruas jalan Sepatan–Mauk melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
 - (e) ruas jalan Kronjo–Ceplak-Pejamuran melewati berada di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 (tiga puluh) meter

- (f) ruas jalan Balaraja–Ceplak melewati Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
- (g) ruas jalan Kutruk–Jambe melewati Kecamatan Jambe dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (h) ruas jalan Kresek–Jenggot melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (i) ruas jalan Kresek–Pejamuran melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekar Baru dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (j) ruas jalan Ceplak–Kresek melewati Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (k) ruas jalan Dangdeur–Patrasana melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Kresek dengan ROW 13 (tiga belas) meter
- (l) ruas jalan Jayanti–Megu melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (m) ruas jalan Cisoka–Megu berada di Kecamatan Cisoka dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (n) ruas jalan Cangkudu–Cisoka melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter.
- (o) ruas jalan Cikuya–Cikasungka (Bts. Bogor) berada di Kecamatan Solear dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (p) ruas jalan Tigaraksa–Cikuya melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (q) ruas jalan Cibadak–Tigaraksa melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (r) ruas jalan Tigaraksa–Jambe melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (s) ruas jalan Jambe–Batok berada di Kecamatan Jambe dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (t) ruas jalan Serdang Kulon–Serdang Wetan melewati Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (u) ruas jalan Pasar Korelet–Serdang Kulon berada di Kecamatan Panongan dengan ROW 20 (dua puluh enam) meter
- (v) ruas jalan Cikupa–Serdang Kulon melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 20 (dua puluh) meter

- (w) ruas jalan Curug–Peusar melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 11 (sebelas) meter
- (x) ruas jalan Curug–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (y) ruas jalan Jatake (Batas Kota Tangerang)–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (z) ruas jalan Binong–Bencongan melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (aa) ruas jalan Curug–Carangpulang melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (bb) ruas jalan Legok–Pagedangan melewati Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (cc) ruas jalan Cisauk–Rumpin melewati Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (dd) ruas jalan Jambu–Patramanggala melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (ee) ruas jalan Rajeg–Mauk melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (ff) ruas jalan Pasar Kemis–Rajeg melewati Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (gg) ruas jalan Jati Gintung–Cituis–Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (hh) ruas jalan Gardu–Tanah Merah melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (ii) ruas jalan Sepatan–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (jj) ruas jalan Bayur Sangego–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (kk) ruas jalan Kedaung Barat–Kali Baru (Kohod) melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (ll) ruas jalan Bojong Renged–Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (mm) ruas jalan Teluknaga–Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (nn) ruas jalan Pangkalan–Tanjung Burung berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 20 (dua puluh) meter

- (oo) ruas jalan Bojongrenged–Kosambi berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (pp) ruas jalan Jatimulya–Dadap berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (qq) ruas jalan Merak–Buniayu berada di Kecamatan Sukamulya ROW 20 (dua puluh) meter
- (rr) ruas jalan Jambu-Buniayu-Jengkol melewati Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (ss) ruas jalan Kukun–Daon-Jambu berada di Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (tt) ruas jalan Cadas-Kukun melewati Kecamatan Sepatan, KecamatanPasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (uu) ruas jalan Suradita-Kranggan berada di Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (vv) ruas jalan Karawaci–Legok melewati Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (ww) ruas jalan yang melewati Bojong-Peusar-Budimulya di Kecamatan Curug dan Kecamatan Tigaraksa dengan ROW 26
- (xx) rencana peningkatan jembatan yaitu jembatan Kelapa Dua mulai dari batas Kota Tangerang ke arah perumahan villa permata di Kecamatan Kelapa Dua
- (yy) Rencana pengembangan Angkutan massal berbasis jalan dapat berupa Bus Rapid Transit (BRT)
- (zz) rencana peningkatan ruas jalan Cisauk–Kranggan, berada di Kecamatan Cisauk

4. Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Jembatan (Kewenangan Kabupaten)

Rencana pembangunan jaringan jalan lokal dan jembatan meliputi :

- (a) ruas jalan pesisir pantai dari Kohod–Tanjung Burung–Tanjung Pasir–Muara–Lemo–Salemban Jaya–Kosambi Barat–Kosambi Timur–Dadap, melewati Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga dan kecamatan Kosambi dengan ROW 20 (dua puluh)
- (b) ruas jalan pesisir pantai dari Jenggot–Muncung–Kronjo–Pagedangan Ilir– Lontar –Karanganyar–Patra Manggala–Mauk Barat–Mauk Timur–Ketapang melewati kecamatan Mekar baru, Kronjo, Kemiri dan kecamatan Mauk dengan ROW 20 (dua puluh) meter

- (c) ruas jalan poros tengah yang meliputi ruas jalan Cikupa–Sindangjaya–Rajeg–Mauk–Kawasan Reklamasi, melewati KecamatanCikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 2 (dua puluh) meter
- (d) ruas jalan sejajar dengan jalan tol dari Desa Bunder, Kecamatan Cikupa – Desa Cibadak Kecamatan Balaraja, melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Balaraja dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (e) ruas jalan Cadas–Kukun–Benda–Buniayu–Jengkol, melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
- (f) ruas jalan Peusar–Budimulya–Bojong–Jalan Raya Serang, melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
- (g) ruas jalan Desa Margasari–Desa Mekar Bakti melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan, dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (h) ruas jalan Sampora–Pakulonan melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 36 (tiga puluh enam) meter
- (i) ruas jalan yang menghubungkan wilayah daratan Kabupaten dengan rencana pengembangan Kawasan Reklamasi di pantai utara melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter;
- (j) Ruas jalan Ruas jalan Balaraja – Kelapa dua, yang merupakan bagian dari ruas MRT (Mass Rapid Transport) Balaraja – Cikarang melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;
- (k) ruas jalan kantor pos - Pasar Gudang di Kecamatan Tigaraksa
- (l) ruas jalan ciatuy – Al-Amjad di Kecamatan Tigaraksa
- (m) ruas jalan dan jembatan penghubung wilayah perbatasan
- (n) ruas jalan yang memanfaatkan daerah sempadan sungai
- (o) ruas jalan akses diperluasan Perimeter Utara bandara Soekarno Hatta sebagai pengganti penutupan M1 yang melewati Desa Rawa Rengas dan Desa Bojongrenged Kecamatan Teluknaga, Desa Rawa Burung dan Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi.

- (p) jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kelapa Dua dan Kelurahan pondok Jagung, Serpong Utara (Ash-Shobirin) (Kota Tangerang Selatan)
- (q) jembatan yang menghubungkan kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Panongan di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- (r) jembatan yang menghubungkan kecamatan Sepatan Timur dan Kota Tangerang di Kecamatan Sepatan Timur dengan panjang jembatan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) meter;
- (s) jembatan Sukadiri di Kecamatan Sukadiri dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- (t) Jembatan Dadap I di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter; dan
- (u) Jembatan Dadap II di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter.
- (v) Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Teluk Naga dan Pakuhaji dengan panjang jembatan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) meter
- (w) Pembangunan jembatan layang/flyover simpang Bitung Jalan Raya Serang di Kecamatan Curug
- (x) Pembangunan jembatan layang/flyover Pasar Cikupa Jalan Raya Serang di Kecamatan Cikupa.
- (y) Pembangunan jembatan layang/flyover Stasiun Kereta Api Cisauk di kecamatan Cisauk
- (z) Pembangunan jembatan layang/flyover simpang Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua
- (aa) Pembangunan jembatan layang/flyover simpang bugel di Kecamatan Tigaraksa
- (bb)Pembangunan jembatan layang/flyover balaraja timur di Kecamatan Balaraja
- (cc) Pembangunan jembatan layang/flyover balaraja barat di Kecamatan Balaraja
- (dd)Pembangunan jembatan layang/flyover di Kecamatan Tigaraksa
- (ee) Pembangunan jembatan layang/flyover gembong balaraja di Kecamatan Balaraja
- (ff) Pembangunan dan pengembangan jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau di Kecamatan Kosambi.

- b) Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di wilayah Kabupaten Tangerang
5. Terminal
- (a) rencana pembangunan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Kelapa Dua;
 - (b) peningkatan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Balaraja;
 - (c) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Cisauk; Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Kronjo.
 - (d) optimalisasi dan peningkatan sub terminal Cisoka dan terminal sentiong di Kecamatan Balaraja menjadi terminal tipe C;
- c) Terminal barang meliputi pembangunan terminal barang di Kecamatan Mauk, pembangunan terminal barang *dry port* di Kecamatan Jambe.
 - d) Jembatan timbang berada di Kecamatan Legok, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kosambi dan jalan Nasional.

Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan perkeretaapian merupakan perkeretaapian umum yang melayani angkutan penumpang dan barang meliputi:

- a) pengembangan sistem rel ganda (*double track*) yang akan melewati Kecamatan Cisauk–Kecamatan Pagedangan–Kecamatan Legok– Kecamatan Panongan–Kecamatan Jambe–Kecamatan Cisoka;
- b) pengembangan Stasiun Kereta Api Daru di Kecamatan Jambe;
- c) pembangunan jaringan perkeretaapian yang akan melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti;
- d) pembangunan jaringan perkeretaapian yang akan melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Mekarbaru;
- e) pembangunan MRT dan/atau LRT Balaraja-Cikarang yang melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Balaraja;
- f) pembangunan LRT lingkaran antara Bandara Soekarno-Hatta-Alam Sutera-BSD City-Sumarecon/Paramount Lippo Karawaci-Citra Raya-Suvarna Padi Cikupa-Kawasan Pantura Teluknaga/Kosambi-Bandara Soekarno Hatta;
- g) pengembangan Stasiun Kereta Api Cikuya di Kecamatan Solear, Stasiun Kereta Api Tigaraksa di Kecamatan Tigaraksa dan Stasiun Kereta Api Cicayur dan Stasiun Kereta Api Cisauk di Kecamatan Cisauk menjadi stasiun TOD (*Transit Oriented Development*); dan

- h) pembangunan Stasiun Kereta Api Balaraja dan Stasiun Kereta Api Tigaraksa sebagai stasiun TOD (*Transit Oriented Development*).

Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Jaringan sungai, danau dan penyeberangan merupakan pengembangan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:

- a) pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan di Desa Surya bahari, Kecamatan Pakuhaji ke Kepulauan Seribu
- b) dermaga tambatan kapal nelayan dan penyeberangan di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga ke Kepulauan Seribu
- c) dermaga tambatan kapal nelayan di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji
- d) Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai Pelabuhan Pengumpan di Kecamatan Sepatan Timur
- e) Rencana pelabuhan barang di Kecamatan Teluknaga

b) Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut meliputi pelabuhan laut dan alur pelayaran.

1) Rencana Pembangunan Pelabuhan laut

- a) rencana pelabuhan orang dan barang di Kecamatan Teluknaga;
- b) rencana pembangunan terminal pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berada di kawasan reklamasi Pantura; dan
- c) rencana pembangunan pelabuhan khusus batu bara di Kecamatan Kronjo
- d) rencana lokasi pelabuhan pengumpan lokal Muara Dadap di Kecamatan Kosambi;

2) Alur Pelayaran

Alur pelayaran sebagaimana akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.

c) Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas bandar udara dan ruang udara.

1) Bandar Udara

Bandar udara meliputi bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil dan pusat pelatihan penerbangan.

- a) Bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil ditetapkan di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta sebagai bandar udara pengumpul skala primer yang terletak di Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga dan Bandar Udara Soekarno Hatta II yang terletak di pulau reklamasi.
- b) Bandar udara yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan latihan penerbangan ditetapkan di Bandar Udara Budiarto Curug di Kecamatan Legok.

2) Ruang Udara

Ruang udara merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:

- a) KKOP Bandara Soekarno–Hatta meliputi Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Sindangjaya; dan Kecamatan Cikupa.
- b) KKOP Bandara Budiarto meliputi : Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua.

Tabel 2.6

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana pembangunan Sistim Jaringan Transportasi Angkutan Massal (Terminal Tipe A dan Terminal Tipe C) cepat terpadu berbasis jalan diwilayah Kabupaten Tangerang	Kesiapan dalam Penyediaan perlengkapan jalan dan manajemen lalu lintas	Belum adanya rencana induk transportasi	Konektivitas antara wilayah meningkat
2	Rencana Pembangunan Jalur LRT, MRT, dan BRT	Kesiapan infrastruktur pendukung sektor perhubungan	Usulan pembangunan perlengkapan jalan Belum terpenuhi keseluruhan	Komitmen yang kuat untuk mewujudkan

2.6.4 Kebijakan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang

1) Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas (PEKAT LANTAS)

Pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Tangerang yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, memadai, terjangkau dan adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik dan handal. Salah satu prasarana yang

sangat perlu dalam rangka menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dan pertumbuhan kota adalah transportasi, karena sektor transportasi merupakan urat nadi distribusi barang dan mobilitas manusia.

Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki banyak titik kemacetan antara lain pada koridor Jalan Raya Serang, Jalan Raya Curug-Legok, Jalan Raya Teluknaga - Dadap – Kamal, Jalan Raya Karawaci – Legok, Jalan Raya Cadas – Sepatan dan Jalan Raya Pasar Kemis. Maka perlu penanganan untuk memelihara kondisi jalan atau pembukaan akses terutama pada simpang-simpang geometri dan rekayasa lalu lintas. Selain itu juga untuk mengatasi kemacetan akan dibangun fly over dan Terminal Tipe C. OPD yang menangani program ini diantaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan, dan Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan.

2.6.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu dari bidangin frastruktur menyangkuti suprasarana, perencanaan dan pemanfaatan ruang, transportasi, dan infastruktur. Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi, social, budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan.

Terjadi disparitas pertumbuha nantara kawasan selatandan kawasan barat Kabupaten Tangerang, sementara pemanfaatan dan intensitas kawasan selatan dan tengah sudah sangat padat dan ruang terbuka untuk umum (publicspace) sangat terbatas termasuk penyediaan infrastruktur dan perhubungan seperti jalan, jembatan, akses bagi pejalan kaki, akses bagi pesepeda, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi bagian sudah terpenuhi. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi pada wilayah-wilayah strategis, dan kawasan pengembangan, perlu diarahkan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendaliannya pada kawasanstrategis.

Disisi lain isu mengurangi kemacetan yaitu melalui pengelolaan transportasi massal yang tepat sasaran, terjangkau dan interkoneksi antarmoda menjadi tantangan, seperti interkoneksi antara transportasi udara dengan transportasi darat. Integrasi perencanaan transportasi dengan pengembangan wilayah menjadi tantangan

2.6.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kemacetan yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara

2. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM Bidang Perhubungan;
3. Rencana pembangunan Jalur BRT, LRT dan MRT di Kabupaten Tangerang, menempatkan Kabupaten Tangerang pada posisi strategis sehingga perlu meningkatkan konektivitas wilayah

Rencana pembangunan Sistem Jaringan Transportasi Angkutan Massal (Terminal Tipe A dan Terminal Tipe C) cepat terpadu berbasis jalan diwilayah Kabupaten Tangerang

D. REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

a. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah gambaran dari arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa periode jabatan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023 sesuai dengan misi yang dijalankan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang terpilih adalah “*Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera*”.

2. Misi

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Pernyataan misi harus disampaikan dengan jelas karena digunakan untuk memberikan arahan cara kerja demi terwujudnya sebuah visi. Misi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius

Misi II : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

Misi III : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif, berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM).

Misi IV : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

Misi V : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

Misi VI : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

b. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Adapun Tujuan yang akan dicapai lima tahun kedepan adalah : **Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera**". Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam table 2.7

Tabel 2.7

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Dan Tujuan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja				Target Capaian															Kondisi Akhir		
				2017		2018		2019			2020			2021			2022			2023					
				VCR/DS	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Penanganan Titik Kemacetan	Presentase Penyelesaian Penanganan Intensitas Kemacetan	-	-	60.5	F	50.7	E	24%	43.5	E	37%	37.8	D	62%	22.5	C	72%	14.5	B	84%	5	A	90%
		Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah	Presentase Trayek Yang Aktif	-	-					74%				74%			74%			74%			74%		

c. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil akhir identifikasi factor-faktor internat dan eksternal Dinas Perhubungan guna penentuan alternative strategi berdasarkan pencermatan dan Focussed Group Discussion untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Analisa SWOT

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p>STRENGTH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pimpinan terhadap meningkatnya pelayanan Perhubungan 2. Adanya SDM yang potensial 3. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik 4. Sarana dan prasarana operasional pelayanan yang dimiliki 5. Jaringan trayek yang memadai 	<p>WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas SDM kurang memadai 2. Kurangnya prasarana operasional kerja yang memadai 3. Kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana perlengkapan angkutan jalan 4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas 5. Belum adanya penerapan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas satu arah. 6. Tingginya Kebutuhan Transportasi Moda Darat
<p>OPPORTUNITY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah di bidang LLAJ 2. Rencana pembangunan BRT, MRT, dan LRT 3. Rencana Pembangunan Tipe C dan Tipe A 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi (ATCS) 5. Kesadaran masyarakat dalam pengawasan outcome kerja instansi pemerintah 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas aparatur Perhubungan 2. Meningkatkan kualitas prasarana kerja 	<p>STRATEGI SW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan 2. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

THREAT	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas 2. Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada 3. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan mulai munculnya angkutan online 4. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dalam mengujikan kendaraannya 5. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum	1. Meningkatkan kualitas sarana perhubungan 2. Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas 2. Meningkatkan sosialisasi etika berlalu lintas

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2018-2023, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menyediakan Perlengkapan Jalan Sesuai dengan Kebutuhan Transportasi / Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
- b. Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor secara Profesional
- c. Membuat Jaringan Trayek sesuai Kebutuhan baik Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek
- d. Penyusunan Kajian Simpul , Kajian Kebutuhan Transportasi dan perlengkapan jalan

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana dan pemangku kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan Visi Renstra. Arah Kebijakan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Melakukan Operasi Tertib Lalu Lintas
- b. Penetapan Kendaraan Layak Uji dan Usia Kendaraan Angkutan
- c. Menyediakan Moda Transportasi Angkutan
- d. Pembangunan Simpul Transportasi Baik Antar Moda Maupun Intermoda dan perlengkapan jalan

Tabel 2.9
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	1	Penanganan Titik Kemacetan	1	Menyediakan Perlengkapan Jalan Sesuai dengan Kebutuhan Transportasi / Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Melakukan Operasi Tertib Lalu Lintas
	2	Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah	1	Membuat Jaringan Trayek sesuai Kebutuhan baik Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Menyediakan Moda Transportasi Angkutan
			2	Penyusunan Kajian Simpul , Kajian Kebutuhan Transportasi dan perlengkapan jalan	Pembangunan Simpul Transportasi Baik Antar Moda Maupun Intermoda dan perlengkapan jalan

d. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2018-2023 adalah: “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
- b. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
- c. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
- e. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
- f. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJMD 2018-

2023 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 5 yaitu: **“Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah”**

Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 2.10
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera”.				
Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	Simpul Transportasi Antar Moda	3. Kurangnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan 4. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Adanya pembangunan Terminal Type A dan C, serta BRT, LRT, MRT
	Program Manajemen Lalu Lintas	Kurangnya Infrastruktur Jalan Yang Memadai	1. Belum Adanya Penerapan Rekayasa Lalu Lintas dan	

			Manajemen LaluLintas Satu Arah	
	Program Pelayanan Angkutan Umum (sitram)	Tingginya Tingkat Jumlah Kendaraan	2 Tingginya Kebutuhan Transportasi Moda Darat 3 Tingkat Kesadaran Dari Masyarakat Berlalu Lintas Masih Rendah	Masyarakat Masih Membutuhkan Angkutam Umum

e. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Visi dan Misi yang akan dicapai Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 adalah penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan transportasi massal perkotaan. Ditindaklanjuti dengan Sasaran Kementerian Perhubungan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- 2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
- 3) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- 4) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
- 6) Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
- 7) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- 8) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- 9) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;
- 10) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
- 11) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
- 12) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

13) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan;

Dari Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang turut mendukung dan berperan serta meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, pelayanan transportasi, dan kapasitas transportasi.

Tabel 2.11
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah	Tingkat Kemacetan Lalu Lintas terus meningkat	4. Simpul Transportasi antar moda 5. Kurangnya infrastruktur yang memadai 6. Tingginya tingkat jumlah kendaraan	Komitmen Pemda; Kerjasama dengan Dishub Provinsi Banten

2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Provinsi banten Tahun 2017-2022

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, memuat Visi pembangunan Provinsi Banten, yaitu: “ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUAL KARIMAH” . Untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 6) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- 7) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
- 8) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
- 9) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
- 10) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Program/kegiatan prioritas Provinsi Banten yang berhubungan dengan Kabupaten Tangerang adalah:

- s) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di daerah meliputi : Serpong-Balaraja, Bojong Gede-Balaraja.
- t) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di daerah meliputi : Tangerang-Merak, Semanan-Rajeg-Balaraja, Kamal-Teluknaga-Rajeg.
- u) Rencana Pengembangan jalan Nasional Tangerang-Bandara Soekarno Hatta
- v) Pengembangan jaringan jalan provinsi meliputi : Banten Lama-Pontang, Pontang-Kronjo, Kronjo-Mauk, Mauk-Teluknaga, Teluknaga-Dadap, Citeras-Tigaraksa, Tigaraksa-Malanengah, Sp. Bitung-Curug, Curug-Legok-Parung Panjang, Cisauk-Jaha.
- w) Pengembangan jaringan Kereta Api, Serang-Cikande-Cikupa-Serpong.
- x) Pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada lintas Parung Panjang-Serpong-Citayam-Nambo-Cikarang; Lintas Serang-Sepadan tol-Balaraja, Lintas Balaraja-Jakarta-Cikarang.
- y) Rencana Pembangunan Dryport di Kecamatan Jambe
- z) Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyebarangan di Provinsi Banten meliputi Cituis-Kep. Seribu, Dadap-Kep. Seribu.
- aa) Rencana pengembangan lokasi wilayah kerja pelabuhan pengumpan lokal di Cituis dan Kresek/Kronjo.
- bb) Koridor Utara (Koridor Ekonomi Banten) menghubungkan sentra-sentra pertumbuhan primer Tangerang-Balaraja-Cikupa-Serang-Clegon-Merak

f. TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHS

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merada pada tahapan keempat RPJPD yaitu tahap usaha peningkatan berkelanjutan. Berdasarkan pencapaian pembangunan selama tiga periode yang dilaksanakan secara konsisten, maka tahapan keempat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Strategi yang dilakukan pada tahapan ini adalah :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- 2) Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan
- 3) Meningkatkan kualitas SDM
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan
- 5) Mengendalikan rencana tata ruang wilayah
- 6) Mengendalikan kualitas lingkungan hidup

2. Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah “**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera**” dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

3. Kebijakan Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Tangerang meliputi sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi sistem jaringan sumber daya air; sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi meliputi :

- 4) sistem jaringan transportasi darat;
- 5) sistem jaringan transportasi laut; dan
- 6) sistem jaringan transportasi udara.

d) Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- 4) Sistem jaringan jalan;
- 5) Sistem jaringan kereta api;
- 6) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

2) Sistem Jaringan Jalan

- g) Jaringan jalan nasional;
- h) Jaringan jalan provinsi;
- i) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- j) Terminal penumpang;
- k) Terminal barang; dan
- l) Jembatan jembatan timbang.

b) Jaringan jalan nasional, meliputi :

(1) Jaringan jalan arteri primer, meliputi :

- (c) peningkatan ruas Jalan Raya Serang yang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti dengan panjang jalan kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilometer.
- (d) peningkatan ruas Jalan Pamulang–Maja yang melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Solear.

(2) Jaringan jalan tol meliputi :

- (j) peningkatan jalan tol Tangerang–Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti;
- (k) rencana ruas jalan tol Sepatan Timur–Pakuhaji–Teluknaga–Kosambi–Bandara Soekarno Hatta melalui Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol JORR II;
- (l) rencana ruas jalan tol Balaraja–Serpong melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Jambe, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan;
- (m) rencana ruas jalan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Balaraja.
- (n) rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu keluar masuk kearah Cikupa di pintu tol Balaraja Timur berada di Kecamatan Balaraja;
- (o) rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu keluar kearah Pasar Kemis di pintu tol Cikupa berada di Kecamatan Cikupa;
- (p) rencana ruas jalan tol Semanan – Rajeg – Balaraja;

- (q) rencana ruas jalan tol prospektif yang terhubung ke Jalan Tol Serpong-Balaraja; dan
- (r) rencana simpang susun jalan tol.

a. Jaringan Jalan Provinsi

i. Jaringan Jalan Provinsi berupa jalan kolektor primer yang meliputi:

- (g) Rencana peningkatan ruas jalan Kronjo–Mauk–Teluknaga–Bandara Soekarno-Hatta yang melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer.
- (h) rencana peningkatan ruas jalan Tigaraksa–Cisoka–Cikuya–Cikasungka yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak, melewati kecamatan Tigaraksa, Cisoka dan kecamatan Solear, dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer;
- (i) rencana peningkatan ruas jalan Malang Nengah – Ranca Kelapa – Kutruk –Tigaraksa yang menghubungkan Kecamatan Legok dengan pusat pemerintahan Kabupaten, melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa, dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) kilometer;
- (j) rencana peningkatan ruas jalan Cisauk–Jaha yang merupakan akses dari Cisauk menuju Legok, melewati Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok, dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) kilometer; dan
- (k) rencana peningkatan ruas jalan Bitung–Curug–Legok-Parung melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer;
- (l) Rencana pengembangan Angkutan massal berbasis jalan dapat berupa Bus Rapid Transit (BRT)

b. Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor (Kewenangan Kabupaten)

Rencana Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten berupa peningkatan jaringan jalan kolektor meliputi:

i. Rencana peningkatan jaringan jalan kolektor meliputi:

- (aaa) Ruas jalan Bojong–Pemda yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa dengan ROW 30 (tiga puluh) meter

- (bbb) Ruas jalan Cikupa–Pasar Kemis melewati Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (ccc) Ruas jalan Jatiuwung–Pasar Kemis berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (ddd) Ruas jalan Sepatan–Mauk melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
- (eee) Ruas jalan Kronjo–Ceplak-Pejamuran melewati berada di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
- (fff) Ruas jalan Balaraja–Ceplak melewati Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
- (ggg) Ruas jalan Kutruk–Jambe melewati Kecamatan Jambe dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (hhh) Ruas jalan Kresek–Jenggot melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (iii) Ruas jalan Kresek–Pejamuran melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekar Baru dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (jjj) Ruas jalan Ceplak–Kresek melewati Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (kkk) Ruas jalan Dangdeur–Patrasana melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Kresek dengan ROW 13 (tiga belas) meter
- (lll) Ruas jalan Jayanti–Megu melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 20 (dua puluh) meter ~~dan;~~
- (mmm) Ruas jalan Cisoka–Megu berada di Kecamatan Cisoka dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (nnn) Ruas jalan Cangkudu–Cisoka melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter.
- (ooo) Ruas jalan Cikuya–Cikasungka (Bts. Bogor) berada di Kecamatan Solear dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (ppp) Ruas jalan Tigaraksa–Cikuya melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (qqq) Ruas jalan Cibadak–Tigaraksa melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (rrr) Ruas jalan Tigaraksa–Jambe melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe dengan ROW 20 (dua puluh) meter

- (sss) Ruas jalan Jambe–Batok berada di Kecamatan Jambe dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (ttt) Ruas jalan Serdang Kulon–Serdang Wetan melewati Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (uuu) Ruas jalan Pasar Korelet–Serdang Kulon berada di Kecamatan Panongan dengan ROW 20 (dua puluh enam) meter
- (vvv) ruas jalan Cikupa–Serdang Kulon melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (www) Ruas jalan Curug–Peusar melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 11 (sebelas) meter
- (xxx) Ruas jalan Curug–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (yyy) Ruas jalan Jatake (Batas Kota Tangerang)–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (zzz) Ruas jalan Binong–Bencongan melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (aaaa) Ruas jalan Curug–Carangpulang melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (bbbb) ruas jalan Legok–Pagedangan melewati Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (cccc) ruas jalan Cisauk–Rumpin melewati Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (dddd) ruas jalan Jambu–Patramanggala melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (eeee) ruas jalan Rajeg–Mauk melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (ffff) ruas jalan Pasar Kemis–Rajeg melewati Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (gggg) ruas jalan Jati Gintung–Cituis–Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (hhhh) ruas jalan Gardu–Tanah Merah melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (iiii) ruas jalan Sepatan–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (jjjj) ruas jalan Bayur Sangego–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 (dua puluh) meter

- (kkkk) ruas jalan Kedaung Barat–Kali Baru (Kohod) melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (llll) ruas jalan Bojong Renged–Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (mmmm) ruas jalan Teluknaga–Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (nnnn) ruas jalan Pangkalan–Tanjung Burung berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (oooo) ruas jalan Bojongrenged–Kosambi berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (pppp) ruas jalan Jatimulya–Dadap berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (qqqq) ruas jalan Merak–Buniayu berada di Kecamatan Sukamulya ROW 20 (dua puluh) meter
- (rrrr) ruas jalan Jambu-Buniayu-Jengkol melewati Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (ssss) ruas jalan Kukun–Daon-Jambu berada di Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (tttt) ruas jalan Cadas-Kukun melewati Kecamatan Sepatan, KecamatanPasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (uuuu) ruas jalan Suradita-Kranggan berada di Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (vvvv) ruas jalan Karawaci–Legok melewati Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (wwww) ruas jalan yang melewati Bojong-Peusar-Budimulya di Kecamatan Curug dan Kecamatan Tigaraksa dengan ROW 26
- (xxxx) rencana peningkatan jembatan yaitu jembatan Kelapa Dua mulai dari batas Kota Tangerang ke arah perumahan villa permata di Kecamatan Kelapa Dua
- (yyyy) Rencana pengembangan Angkutan massal berbasis jalan dapat berupa Bus Rapid Transit (BRT)
- (zzzz) rencana peningkatan ruas jalan Cisauk–Kranggan, berada di Kecamatan Cisauk

ii.Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Jembatan (Kewenangan Kabupaten)

Rencana pembangunan jaringan jalan lokal dan jembatan meliputi :

- (gg) ruas jalan pesisir pantai dari Kohod–Tanjung Burung–Tanjung Pasir–Muara–Lemo–Salemban Jaya–Kosambi Barat–Kosambi Timur–Dadap, melewati Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga dan kecamatan Kosambi dengan ROW 20 (dua puluh)
- (hh) ruas jalan pesisir pantai dari Jenggot–Muncung–Kronjo–Pagedangan Iir– Lontar –Karanganyar–Patra Manggala–Mauk Barat–Mauk Timur– Ketapang melewati kecamatan Mekar baru, Kronjo, Kemiri dan kecamatan Mauk dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (ii) ruas jalan poros tengah yang meliputi ruas jalan Cikupa–Sindangjaya–Rajeg–Mauk–Kawasan Reklamasi, melewati KecamatanCikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 2 (dua puluh) meter
- (jj) ruas jalan sejajar dengan jalan tol dari Desa Bunder, Kecamatan Cikupa – Desa Cibadak Kecamatan Balaraja, melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Balaraja dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- (kk) ruas jalan Cadas– Kukun –Benda –Buniayu –Jengkol, melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
- (ll) ruas jalan Peusar–Budimulya–Bojong–Jalan Raya Serang, melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
- (mm) ruas jalan Desa Margasari–Desa Mekar Bakti melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan, dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
- (nn) ruas jalan Sampora–Pakulonan melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 36 (tiga puluh enam) meter
- (oo) ruas jalan yang menghubungkan wilayah daratan Kabupaten dengan rencana pengembangan Kawasan Reklamasi di pantai utara melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter;
- (pp) Ruas jalan Ruas jalan Balaraja – Kelapa dua, yang merupakan bagian dari ruas MRT (Mass Rapid Transport) Balaraja – Cikarang melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;

- (qq) ruas jalan kantor pos - Pasar Gudang di Kecamatan Tigaraksa
- (rr) ruas jalan ciatuy – Al-Amjad di Kecamatan Tigaraksa
- (ss) ruas jalan dan jembatan penghubung wilayah perbatasan
- (tt) ruas jalan yang memanfaatkan daerah sempadan sungai
- (uu) ruas jalan akses diperluasan Perimeter Utara bandara Soekarno Hatta sebagai pengganti penutupan M1 yang melewati Desa Rawa Rengas dan Desa Bojongrenged Kecamatan Teluknaga, Desa Rawa Burung dan Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi.
- (vv) jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kelapa Dua dan Kelurahan pondok Jagung, Serpong Utara (Ash-Shobirin) (Kota Tangerang Selatan)
- (ww) jembatan yang menghubungkan kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Panongan di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- (xx) jembatan yang menghubungkan kecamatan Sepatan Timur dan Kota Tangerang di Kecamatan Sepatan Timur dengan panjang jembatan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) meter;
- (yy) jembatan Sukadiri di Kecamatan Sukadiri dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- (zz) Jembatan Dadap I di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter; dan
- (aaa) Jembatan Dadap II di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter.
- (bbb) Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Teluk Naga dan Pakuhaji dengan panjang jembatan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) meter
- (ccc) Pembangunan jembatan layang/flyover simpang Bitung Jalan Raya Serang di Kecamatan Curug
- (ddd) Pembangunan jembatan layang/flyover Pasar Cikupa Jalan Raya Serang di Kecamatan Cikupa.
- (eee) Pembangunan jembatan layang/flyover Stasiun Kereta Api Cisauk di kecamatan Cisauk
- (fff) Pembangunan jembatan layang/flyover simpang Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua
- (ggg) Pembangunan jembatan layang/flyover simpang bugel di Kecamatan Tigaraksa
- (hhh) Pembangunan jembatan layang/flyover balaraja timur di Kecamatan Balaraja

- (iii) Pembangunan jembatan layang/flyover balaraja barat di Kecamatan Balaraja
- (jjj) Pembangunan jembatan layang/flyover di Kecamatan Tigaraksa
- (kkk) Pembangunan jembatan layang/flyover gembong balaraja di Kecamatan Balaraja
- (III) Pembangunan dan pengembangan jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau di Kecamatan Kosambi.

c. Terminal Penumpang

- (e) Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Kelapa Dua;
- (f) Peningkatan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Balaraja;
- (g) Pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Cisauk;
- (h) Optimalisasi dan peningkatan sub terminal Cisoka dan terminal sentiong di Kecamatan Balarajamenjadi terminal tipe C;
- (i) Pembangunan terminal penumpang terpadu tipe C di Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Kronjo.

d. Terminal Barang

Terminal barang meliputi pembangunan terminal barang di Kecamatan Pasar Kemis, pembangunan terminal barang *dry port* di Kecamatan Jambe.

e. Jembatan Timbang

Jembatan Timbang berada di Kecamatan Legok, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kosambi.

3) Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan perkeretaapian merupakan perkeretaapian umum yang melayani angkutan penumpang dan barang meliputi:

- i) pengembangan sistem rel ganda (*double track*) yang akan melewati Kecamatan Cisauk–Kecamatan Pagedangan–Kecamatan Legok– Kecamatan Panongan–Kecamatan Jambe–Kecamatan Cisoka;
- j) pengembangan Stasiun Kereta Api Daru di Kecamatan Jambe;
- k) pembangunan jaringan perkeretaapian yang akan melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti;
- l) pembangunan jaringan perkeretaapian yang akan melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri,

Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Mekarbaru;

- m) pembangunan MRT dan/atau LRT Balaraja-Cikarang yang melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Balaraja;
- n) pembangunan LRT lingkaran antara Bandara Soekarno-Hatta-Alam Sutera-BSD City-Sumarecon/Paramount Lippo Karawaci-Citra Raya-Suvarna Padi Cikupa-Kawasan Pantura Teluknaga/Kosambi-Bandara Soekarno Hatta;
- o) pengembangan Stasiun Kereta Api Cikuya di Kecamatan Solear, Stasiun Kereta Api Tigaraksa di Kecamatan Tigaraksa dan Stasiun Kereta Api Cicayur dan Stasiun Kereta Api Cisauk di Kecamatan Cisauk menjadi stasiun TOD (*Transit Oriented Development*); dan
- p) pembangunan Stasiun Kereta Api Balaraja dan Stasiun Kereta Api Tigaraksa sebagai stasiun TOD (*Transit Oriented Development*).

4) Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Jaringan sungai, danau dan penyeberangan merupakan pengembangan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:

- f) pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan di Desa Surya bahari, Kecamatan Pakuhaji ke Kepulauan Seribu
- g) dermaga tambatan kapal nelayan dan penyeberangan di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga ke Kepulauan Seribu
- h) dermaga tambatan kapal nelayan di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji
- i) Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai Pelabuhan Pengumpan di Kecamatan Sepatan
- j) Rencana pelabuhan barang di Kecamatan Teluknaga

E. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut meliputi pelabuhan laut dan alur pelayaran.

3) Rencana Pembangunan Pelabuhan laut

- e) rencana pelabuhan orang dan barang di Kecamatan Teluknaga;
- f) rencana pembangunan terminal pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berada di kawasan reklamasi Pantura; dan
- g) rencana pembangunan pelabuhan khusus batu bara di Kecamatan Kronjo
- h) rencana lokasi pelabuhan pengumpan lokal Muara Dadap di Kecamatan Kosambi;

4) Alur Pelayaran

Alur pelayaran sebagaimana akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.

F. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas bandar udara dan ruang udara.

3) Bandar Udara

Bandar udara meliputi bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil dan pusat pelatihan penerbangan.

- c) Bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil ditetapkan di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta sebagai bandar udara pengumpul skala primer yang terletak di Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga dan Bandar Udara Soekarno Hatta II yang terletak di pulau reklamasi.
- d) Bandar udara yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan latihan penerbangan ditetapkan di Bandar Udara Budiarto Curug di Kecamatan Legok.

4) Ruang Udara

Ruang udara merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:

- c) KKOP Bandara Soekarno–Hatta meliputi Kecamatan Teluknaga;Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Sindangjaya; dan Kecamatan Cikupa.
- d) KKOP Bandara Budiarto meliputi : Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua.

Tabel 2.12
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana pembangunan Sistim Jaringan Transportasi Angkutan Massal (Terminal Tipe A dan Terminal Tipe C) cepat terpadu berbasis jalan diwilayah Kabupaten Tangerang	Kesiapan dalam Penyediaan perlengkapan jalan dan manajemen lalu lintas	Belum adanya rencana induk transportasi	Konektivitas antara wilayah meningkat
2.	Rencana Pembangunan Jalur LRT, MRT, dan BRT	Kesiapan infrastruktur pendukung sektor perhubungan	Usulan pembangunan perlengkapan jalan Belum terpenuhi keseluruhan	Komitmen yang kuat untuk mewujudkan

3. Kebijakan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang

a. Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas (PEKAT LANTAS)

Pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Tangerang yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, memadai, terjangkau dan adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik dan handal. Salah satu prasarana yang sangat perlu dalam rangka menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dan pertumbuhan kota adalah transportasi, karena sektor transportasi merupakan urat nadi distribusi barang dan mobilitas manusia.

Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki titik kemacetan antara lain pada koridor Jalan Raya Serang, Jalan Raya Curug-Legok, Jalan Raya Teluknaga - Dadap – Kamal, Jalan Raya Karawaci – Legok, Jalan Raya Cadas – Sepatan dan Jalan Raya Pasar Kemis. Maka perlu dilakukan penanganan kemacetan di antaranya dengan melakukan Rekayasa jalan, pembangunan APILL/Rambu Lalu Lintas dan ATCS.

Selain itu juga untuk mengatasi kemacetan akan dibangun fly over dan Terminal Tipe C. OPD yang menangani program ini diantaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan, dan Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan.

g. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu dari bidang infrastruktur menyangkut suprasarana, perencanaan dan pemanfaatan ruang, transportasi, dan infrastruktur. Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi, social, budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan.

Terjadi disparitas pertumbuhan antara kawasan selatan dan kawasan barat Kabupaten Tangerang, sementara pemanfaatan dan intensitas kawasan selatan dan tengah sudah sangat padat dan ruang terbuka untuk umum (publicspace) sangat terbatas termasuk penyediaan infrastruktur dan perhubungan seperti jalan, jembatan, akses bagi pejalan kaki, akses bagi pesepeda, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi bagian sudah terpenuhi. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi pada wilayah-wilayah strategis, dan kawasan pengembangan, perlu diarahkan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendaliannya pada kawasan strategis.

Disisi lain isu mengurangi kemacetan yaitu melalui pengelolaan transportasi massal yang tepat sasaran, terjangkau dan interkoneksi antarmoda menjadi tantangan, seperti interkoneksi antara transportasi udara dengan transportasi darat. Integrasi perencanaan transportasi dengan pengembangan wilayah menjadi tantangan

1. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kemacetan yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara
- b. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM Bidang Perhubungan;
- c. Rencana pembangunan Jalur BRT, LRT dan MRT di Kabupaten Tangerang, menempatkan Kabupaten Tangerang pada posisi strategis sehingga perlu meningkatkan konektivitas wilayah Rencana pembangunan Sistem Jaringan Transportasi Angkutan Massal (Terminal Tipe A dan Terminal Tipe C) cepat terpadu berbasis jalan di wilayah Kabupaten Tangerang

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2016-2020, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Banten, RPJM Provinsi Banten 2019- 2023, RKPD Provinsi Banten 2022 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang antara lain :

1. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung operasional layanan angkutan umum massal dalam kerangka sistem transit Kabupaten;
2. Mengembangkan pola manajemen lalu lintas;
3. Meningkatkan kapasitas dan fungsi prasarana dan fasilitas LLAJ

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan dimana hal tersebut bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Tujuan sendiri lebih mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi publik. Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, sasaran pertama adalah Penanganan Titik Kemacetan, sasaran yang kedua adalah Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah.

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Dan Tujuan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian															Kondisi Akhir				
				2017		2018		2019			2020			2021			2022			2023					
				VCR/DS	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%	VCR/DS	LOS (LEVEL OF SERVICE)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Penanganan Titik Kemacetan	Presentase Penyelesaian Penanganan Intensitas Kemacetan	-	-	60.5	F	50.7	E	24%	43.5	E	37%	37.8	D	62%	22.5	C	72%	14.5	B	84%	5	A	90%
		Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah	Presentase Trayek Yang Aktif	-	-					74%				74%			74%			74%			74%		

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakantindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu SKPD. Sesuai dengan hasil Forum SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2022, maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

2. KEGIATAN

Kegiatan merupakan bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut yang merupakan masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sebanyak 2 Program dan 17 Kegiatan, yang terdiri dari program SKPD sebanyak 1 Program dan 7 Kegiatan, serta program Wajib Pilihan sebanyak 1 Program dan 10 Kegiatan . Adapun Anggaran Untuk program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rencana Program Dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang
Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								29.231.239.047
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								266.388.378
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	80.284.800
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	7.632.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	178.471.578

		keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)							
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11.702.849.460
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	11.687.897.460
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	14.952.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								31.052.000
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	31.052.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								749.290.500
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran,	100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	499.810.500

		dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)							
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	249.480.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.260.149.769
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	45.000.090
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	760.906.665
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	122.563.314

		kinerja perangkat daerah (DISHUB)							
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	146.930.700
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	71.926.000
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	112.788.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	1.000.035.000

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12.494.393.940
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	15.000.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	528.233.940
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	11.951.160.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.727.115.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	97 Unit	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	514.020.000

20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi ke pegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	97 Unit	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	608.055.000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi ke pegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	206.950.000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi ke pegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	299.390.000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi ke pegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DISHUB) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DISHUB)	100 Persen 100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	98.700.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								28.064.012.907
8	Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								196.000.611

24	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Persentase jaringan trayek dan moda transportasi Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten Prosentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	80 Persen 96.55 Persen 88 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	96.55 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	196.000.611
9	Penyediaan Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								20.194.115.531
25	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	81 Persen	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	130 Unit	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	81 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	1.579.550.998
26	Penyediaan Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	81 Persen	Jumlah Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	81 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	1.502.253.317
27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	81 Persen	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	400 Unit	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	81 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	16.812.311.216
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlangkapan Jalan	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	81 Persen	Jumlah Perlangkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9 Unit	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	81 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	300.000.000
10	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								2.445.292.088
29	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlangkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlangkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 Unit	Persentase Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	707.914.488
30	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Persentase Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	1.539.377.600
31	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Persentase Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	198.000.000
11	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								100.000.000
32	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	Persentase Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	100.000.000
12	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								920.813.815

33	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	120.435.715
34	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	100.161.600
35	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 Laporan	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	350.040.300
36	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	350.176.200
13	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								215.440.750
37	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	96.55 Persen	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	Persentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	96.55 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	84.918.800
38	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	96.55 Persen	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	Persentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	96.55 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	130.521.950
14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								137.114.295
39	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Persentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	96.55 Persen	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	4 Laporan	Persentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	96.55 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	137.114.295

	Terintegrasi Secara Elektronik			Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
15	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								261.880.628
40	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	261.880.628
16	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								1.427.500.000
41	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	Persentase Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	1.327.500.000
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Persentase Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	100 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	100.000.000
17	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								2.165.855.189
43	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	603.355.189
44	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	1.062.500.000
45	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	100.000.000
46	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan	1 Laporan	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	100.000.000

				Bermotor Wajib Uji					
47	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	250.000.000
48	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80 Persen	Kab. Tangerang, Sukamulya, Parahu	50.000.000
Jumlah Total									57.295.251.954

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tangerang.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kabupaten Tangerang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Dinas Perhubungan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Tangerang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 atau merupakan tahun Kelima dari periode RPJM 2019- 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini .:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan ;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2023 disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan penentuan dalam mengambil langkahlangkah pelaksanaan

Sukamulya,

2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANGERANG**



Drs. H. AGUS SURYANA, M.Si

NIP. 19660409 198603 1 005

Pembina Utama Muda (IV/c)